BAB II

PROVIDENTIA DEI MENURUT JOHN CALVIN

2.1 Biografi John Calvin

John Calvin, lahir pada 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam Reformasi Protestan abad ke-16 dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teologi Reformed. Calvin lahir dari keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan gereja Katolik Roma. Ayahnya, Gerard Cauvin, bekerja sebagai notaris gereja dan sekretaris uskup di Noyon, sehingga Calvin memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik sejak usia muda. Pada masa mudanya, Calvin menempuh pendidikan di Paris dan mempelajari bidang humaniora, filsafat, serta teologi. Awalnya ia dipersiapkan untuk menjadi imam Katolik Roma. Namun, atas keinginan ayahnya, Calvin kemudian beralih mempelajari hukum di Universitas Orleans dan Bourges.[8] Dalam masa pendidikannya, Calvin dipengaruhi oleh gerakan humanisme Renaisans yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber asli, khususnya Alkitab dan tulisan para bapa gereja. Pengaruh tersebut kemudian terlihat dalam metode penafsiran Alkitab yang digunakan Calvin dalam karya-karyanya.

Perjumpaan Calvin dengan pemikiran Reformasi membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mengalami pertobatan yang membuatnya meninggalkan tradisi Katolik Roma dan menerima ajaran Reformasi Protestan. Calvin sendiri menyebut pengalaman tersebut sebagai suatu pertobatan yang menuntunnya untuk

[8] Francois Wendel, *Calvin: Origins and Development of His Religious Thought*, trans. Philip Mairet (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1997), 28.

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah.[9] Sejak saat itu, Calvin mulai aktif menulis dan mengembangkan pemikiran teologis yang kemudian memberikan pengaruh besar bagi gereja-gereja Protestan.

Pada tahun 1536, Calvin menerbitkan karya terkenalnya yang berjudul *Institutes of the Christian Religion*. Buku ini menjadi salah satu karya teologi sistematika terpenting dalam tradisi Reformasi. Melalui karya tersebut, Calvin menjelaskan pokok-pokok ajaran iman Kristen, termasuk mengenai keselamatan, gereja, kedaulatan Allah, dan Providentia Dei. Karya ini terus dikembangkan oleh Calvin sepanjang hidupnya dan menjadi dasar penting bagi perkembangan teologi Reformed.

Pelayanan Calvin sangat erat kaitannya dengan kota Jenewa, Swiss. Calvin berupaya membangun reformasi gereja dan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Calvin tidak hanya berperan sebagai teolog, tetapi juga sebagai pemimpin gereja yang dalam pelayanannya mempertemukan refleksi doktrinal dengan masalah pendidikan, pengungsi, kemiskinan, kesehatan, disiplin gereja, dan pemerintahan kota.[10] Meskipun sempat diusir dari Jenewa pada tahun 1538 akibat konflik dengan pemerintah kota, Calvin kembali pada tahun 1541 dan melanjutkan pelayanannya hingga akhir hidupnya.

2.2 Pokok-Pokok Pemikiran John Calvin tentang Providentia Dei

Menurut John Calvin, *Providentia Dei* adalah ajaran yang menegaskan bahwa Allah bukan hanya Pencipta, tetapi juga Pemelihara aktif atas seluruh ciptaan .

[9] John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, 2 Jilid (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1960), I. xxi.

[10] Alister E. McGrath, *A Life of John Calvin*, 102.

Calvin memahami *providentia* sebagai pemeliharaan Allah yang menyeluruh atas segala sesuatu, sehingga tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau lepas dari kendali-Nya.[11]

2.2.1 Pemeliharaan dan Pemerintahan Allah (Preservation and Governance)

Dalam *Institutio*, Calvin menegaskan bahwa *providensia* Allah mencakup masa lalu dan masa depan, bekerja melalui sarana, tanpa sarana, bahkan melawan sarana, dan mengatur seluruh peristiwa dalam sejarah dunia. Dengan demikian, dunia tidak berjalan secara acak, melainkan berada di bawah rencana dan kehendak Allah yang bijaksana.[12] Calvin menolak pandangan bahwa alam semesta dibiarkan berjalan sendiri setelah diciptakan, sebab menurutnya Allah tetap hadir dan bekerja di dalam sejarah, termasuk dalam hal-hal yang tampak kecil maupun besar.

Selain memelihara, Allah juga memerintah dan mengatur serta mengarahkan seluruh peristiwa dalam dunia. Allah bukan hanya menopang, tetapi juga secara aktif memerintah dan mengarahkan seluruh ciptaan untuk maksud dan tujuan-Nya yang mulia dan penuh kasih. [13]Allah bekerja melalui berbagai realitas hidup manusia, termasuk dalam situasi sosial, ekonomi, dan politik. Calvin melihat bahwa Allah dapat memakai semua itu untuk melaksanakan maksud-Nya yang baik bagi umat-Nya, meskipun manusia sering tidak langsung memahaminya. Karena itu, *providensia* bukan hanya doktrin tentang "Allah menyediakan

[11] Calvin, *Institutes*, I.xvi.1.
[12] Calvin, *Institutes*, I.xviii.1.
[13] Th. van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme (Gunung Mulia, 2004), 208.

kebutuhan," melainkan tentang kedaulatan Allah yang mengarahkan seluruh realitas menuju tujuan-Nya.[14]

Dalam pandangan Calvin, ajaran ini juga memberi penghiburan rohani bagi orang percaya. Jika segala sesuatu berada dalam tangan Allah, maka orang beriman tidak hidup dalam ketakutan terhadap kebetulan atau kekacauan dunia. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk percaya, berserah, dan tetap bertindak dengan bertanggung jawab, karena usaha manusia tetap berada di bawah pemeliharaan Allah. Calvin mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui sarana-sarana sekunder atau alat-alat insani yang dipakai-Nya untuk melaksanakan kehendak-Nya.

2.2.2 Pandangan Calvin terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Kemiskinan

Bagi John Calvin, kedaulatan Allah tidak boleh berhenti di dalam ruang gereja atau menjadi sekadar perdebatan teologis yang abstrak. Iman Kristen yang sejati harus diwujudkan dalam aksi nyata di tengah realitas kehidupan masyarakat.[15] Calvin menolak pemisahan yang tajam antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial. Sebab itu, isu kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan ketidakadilan dipandang sebagai persoalan yang juga memiliki dimensi teologis yang mendalam.

Calvin menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup saling bergantung satu sama lain. Atas dasar itu, orang percaya dipanggil untuk merefleksikan kasih Allah melalui kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang rentan dan membutuhkan pertolongan.[16] Dalam pandangan

[14] https://repo.ukitoraja.ac.id/id/eprint/1363/1/HALAMAN%20SAMPUL.pdf

[15] Calvin, *Institutes*, III.vii.1-2.
[16] Calvin, Institutes, III.vii.5-6.

ini, pelayanan kepada orang miskin bukan sekadar tindakan belas kasihan sosial, melainkan bagian dari panggilan iman dan tanggung jawab gereja dalam menghadirkan kasih Allah di bumi.

Di Jenewa, Calvin mendorong reformasi sosial yang nyata melalui pengaktifan kembali jabatan diaken dalam gereja. Pelayanan diakonia dipahami secara spesifik memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan fisik masyarakat, khususnya orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan para pengungsi.[17] Calvin melihat pelayanan karitatif ini memiliki kedudukan yang setara dan tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan Injil (firman Tuhan).

Bukti histori dari perhatian sosial Calvin juga terlihat jelas dalam pengelolaan *Hôpital Général* (Rumah Sakit Umum) di Jenewa. Lembaga sosial tersebut digunakan untuk mendistribusikan bantuan pangan, pakaian, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal bagi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi.[18] Melalui reformasi social ini, Calvin membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan kesejahteraan fisik manusia merupakan bagian penting dari ekspresi iman Kristen.

2.3 Pemerintahan Sipil Menurut John Calvin

Selain gereja, Calvin juga menegaskan bahwa institusi pemerintah sipil memikul tanggung jawab atau mandat dari Allah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dipahami sebagai sarana sekunder yang ditetapkan Allah untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi kehidupan

[17] Calvin, Institutes, IV.iii.9.

[18] John Calvin, "Draft Ecclesiastical Ordinances (1541)," *Calvin: Theological Treatises, ed. J. K. S. Reid* (Philadelphia: Westminster Press, 1954), 64-66.

manusia.[19] Walaupun, Allah sebenarnya mampu melakukan segala sesuatu secara langsung, tetapi dalam kebijaksanaan-Nya, Ia memilih memakai manusia dan berbagai struktur kehidupan sebagai alat pemeliharaan-Nya.[20]

Menurut John Calvin, pemerintahan sipil adalah salah satu anugerah Allah bagi kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Calvin memandang negara bukan sekadar alat kekuasaan politis, melainkan lembaga yang ditetapkan Allah untuk memelihara ketertiban umum, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian di tengah masyarakat. Dalam pemikirannya, pemerintah sipil memiliki tugas yang sangat penting, yaitu melindungi warga dari kejahatan, mengatur kehidupan sosial agar berjalan tertib, memajukan keadilan, serta memelihara kesejahteraan umum. Karena itu, jabatan pemerintahan bagi Calvin bukanlah jabatan yang sekuler dalam arti terlepas dari Allah, melainkan suatu panggilan yang kudus dan terhormat di hadapan Tuhan.[21]

Calvin merumuskan tujuan pemerintahan sipil secara sangat padat dalam *Institutes* IV.20.2, yakni

> *"to cherish and protect the outward worship of God, to defend sound doctrine of piety and the position of the church, to adjust our life to the society of men, to form our social behavior to civil righteousness, to reconcile us with one another, and to promote and foster general peace and tranquility."* [22]

Rumusan ini menunjukkan bahwa bagi Calvin tugas negara tidak semata-mata administratif atau politis, melainkan juga memiliki dimensi moral dan religius. Negara tidak menciptakan keselamatan rohani, tetapi ia bertugas menjaga

[19] Calvin, Institutes, IV.xx.2-4.
[20] Calvin, *Institutes*, IV.III.1.
[21] https://media.neliti.com/media/publications/344812-sikap-kritis-terhadap-kekuasaan-dalam-tr-eb073760.pdf
[22] Calvin, Institutes, IV.xx.2

kondisi lahiriah agar penyembahan kepada Allah, kehidupan gerejawi, dan kehidupan sosial yang tertib dapat berlangsung di tengah masyarakat.[23]

Jadi, tugas negara menurut Calvin dapat dipahami sebagai berikut: pertama, menegakkan keadilan dan menghukum kejahatan agar masyarakat tidak jatuh ke dalam kekacauan; kedua, memelihara ketertiban, keamanan, dan kedamaian publik; ketiga, mendukung kesejahteraan umum, baik secara material, sosial, maupun moral; dan keempat, menjaga agar kehidupan bersama berjalan sesuai dengan hukum yang adil. Dalam beberapa pembacaan atas Calvin, pemerintah juga dipandang berkewajiban melindungi penyembahan kepada Allah secara lahiriah dan membela gereja dalam kehidupan publik, walaupun Calvin tetap membedakan dengan jelas peran gereja dan peran negara. Jadi, pemerintahan sipil tidak menggantikan gereja, tetapi bekerja dalam bidangnya sendiri untuk kebaikan bersama.[24]

Calvin menegaskan bahwa dalam dunia yang jatuh pun Allah tetap memelihara ciptaan melalui pemerintahan sipil, yang berfungsi menjaga kehidupan duniawi agar tetap tertib sampai tujuan akhir itu digenapi. Sehingga, pemerintahan Allah tidak hanya dipahami sebagai pemerintahan-Nya atas gereja dan keselamatan, tetapi juga atas tatanan dunia melalui institusi politik, hukum, dan sosial. Pemerintah yang adil, menurut Calvin, menjadi salah satu cara Allah memelihara dunia.

Pandangan mengenai pemerintahan sipil dalam perspektif Kristen juga memiliki dasar yang kuat dalam kesaksian Alkitab. Dalam Roma 13:1-2, Paulus

[23] https://www.e-journal.sttaletheia.ac.id/index.php/solagratia/article/download/88/84/0
[24] https://e-journal.sttaletheia.ac.id/index.php/solagratia/article/download/60/56/0

menegaskan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah tidak dipandang sebagai sesuatu yang terlepas dari kedaulatan Allah. Pemerintah memiliki tempat dalam tatanan kehidupan yang berada di bawah pemerintahan Allah. Karena itu, kekuasaan pemerintah pada hakikatnya bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan kekuasaan yang harus dijalankan dalam kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah.

Namun, Roma 13:1-2 tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi bahwa setiap tindakan pemerintah selalu benar atau bahwa rakyat harus menerima setiap keputusan pemerintah tanpa penilaian kritis. Penempatan pemerintah di bawah kedaulatan Allah justru menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaannya. Pemerintahan yang menerima mandat dari Allah dipanggil untuk menjalankan tugasnya demi kebaikan masyarakat, bukan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, ketaatan kepada pemerintah dalam perspektif Alkitab perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan keadilan dan kebaikan bersama.

Hal tersebut diperjelas dalam 1 Petrus 2:13-14. Jemaat dinasihati untuk tunduk kepada lembaga-lembaga manusia karena Tuhan, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada penguasa yang diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Teks ini memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki fungsi menjaga ketertiban dan membedakan antara kejahatan dan kebaikan. Karena itu, pemerintahan tidak

hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangannya secara benar, adil, dan demi kehidupan masyarakat.

Kedua bagian Alkitab tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kekuasaan pemerintah dan tanggung jawab moral. Pemerintah memang memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat, tetapi otoritas tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Dalam kerangka ini, pemerintah dipanggil untuk menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan John Calvin bahwa pemerintah sipil merupakan sarana yang dipakai Allah untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, dan menjaga kesejahteraan manusia.

Berdasarkan pandangan tersebut, kebijakan sosial maupun tindakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh dipandang sebagai wilayah yang terpisah dari karya *providentia* Allah di dalam dunia. Secara teoritis, pandangan Calvin mengenai tanggung jawab sosial ini membuktikan bahwa doktrin *Providentia Dei* tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritualitas manusia, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan kesejahteraan jasmani masyarakat. Allah bekerja melalui berbagai sarana institusional, baik gereja maupun pemerintah untuk memelihara kehidupan ciptaan-Nya dan menghadirkan pertolongan bagi mereka yang mengalami penderitaan.

Pandangan Calvin mengenai kedudukan pemerintah sipil sebagai sarana pemeliharaan Allah ini memiliki akar yang kuat bagi Gereja Toraja. Tradisi

teologi Gereja Toraja, yang berakar pada teologi *Reformed* Calvinis, secara eksplisit mengakui strategi ini. Di dalam Pengakuan Gereja Toraja (PGT) Bab VII Butir 6, ditegaskan secara teologis bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga sosial merupakan alat di tangan Tuhan untuk menyelenggarakan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran serta untuk memerangi kejahatan dalam tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat. Lebih dalam lagi, konsep hubungan antara institusi gereja dan negara dalam tradisi Calvinis sejatinya ditentukan oleh dua prinsip utama, yaitu kemandirian dan kesalingterhubungan. Meskipun keduanya adalah lembaga yang terpisah secara struktural, di mana gereja mengurusi ranah spiritual dan negara mengurusi kehidupan sipil, keduanya saling terkait erat dalam melayani kehendak Allah yang sama guna mengupayakan kesejahteraan masyarakat.[25]

[25] Lazarus H. Purwanto, "John Calvin Dan Tata Gereja Serta Maknanya Bagi Upaya Kontekstualisasi Tata Gereja Di Indonesia," *Jurnal Teologi Tongkonan Kamaya* 1, no. 1 (2014): 62.